

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan memuat beberapa dasar urutan metode penulisan skripsi, yang akan dijabarkan sebagai berikut;

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah laut yang paling dominan, mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, baik hasil tambang, hasil hutan maupun laut itu sendiri. Kekayaan tersebut ternyata tidak sejalan dengan kekayaan sumber daya manusia yang berdiri di surganya bumi ini. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Namun, semua itu lebih banyak dikuasai perusahaan asing dan kita hanya menjadi mandor yang menikmati sebagian dari manfaat atas karunia tersebut.

Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi kedelapan untuk komoditas batu bara, tetap saja terbelit beban utang yang tidak sedikit dan rasio orang miskinnya pun mencapai 17 juta jiwa. Kekayaan tambang Indonesia yang sudah dikeruk puluhan tahun ternyata hanya menghasilkan 11 persen dari pendapatan ekspor dan menyumbang 2,5 dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Indonesia memang tidak bisa berharap banyak dari pertambangan karena sebagian besar industri tambang di Indonesia adalah perusahaan dengan modal asing. Oleh karena itu, meskipun saat ini industri tambang menikmati rezeki nomplok dari kenaikan harga komoditas tambang, industri manufaktur di Indonesia yang mengandalkan bahan baku tambang justru menghadapi masalah kekurangan pasokan komoditas tambang. Misalnya, industri semen, logam, aluminium, timah, batu bara, dan gas¹.

PT Freeport Indonesia salah satu perusahaan pengolah tambang emas yang berada di Papua Barat. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan dunia yang penuh dengan kontroversi baik untuk masalah ekonomi sampai pada lingkungan hidup. Mulai dari pengolahan sampai pada limbah buang tersebut tak luput dari sorotan penulis.

Penulis mengambil PT Freeport Indonesia dikarenakan banyaknya wacana yang dapat diperoleh dan tersedianya data tentang perusahaan dunia tersebut, disamping itu yang menarik bagi penulis adalah peran pemerintah Indonesia dalam melakukan perjanjian-perjajian kontrak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dinilai tidak fair bagi timbal balik untuk masa depan negara Indonesia.

Masalah yang menarik bagi penulis adalah masalah ekologi lingkungan hidup yang berada di Indonesia tepatnya kawasan tambang-tambang perusahaan dunia tersebut khususnya PT Freeport Indonesia, karena banyak wacana mengenai kerusakan akibat pengolahan hasil bumi yang

¹ Biyung Wijaya K, *Kekayaan Indonesia Sudah Tak ditangan Kita*, diakses dari <http://www.mail-archive.com/forum@alumni-akabogor.net/msg00246.html> pada tanggal 18 Januari 2011 pukul 16.32

dimuat di media elektronik maupun media cetak. Ini menarik karena pemerintah Indonesia dalam perjanjian “bagi hasil” pun tidak bisa dibalang adil. Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika kontrak perjanjian itu sudah dibuat.

Segala bentuk kegiatan perusahaan tersebut menjadi sorotan tersendiri, salah satunya tentang perusakan lingkungan yang sekarang banyak disorot oleh berbagai media, memunculkan segala bentuk komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang beranggapan bahwa selain hanya mengambil hasil bumi harus juga menjaga ekosistem disekitar perusahaan tambang tersebut.

Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) disingkat WOC adalah pertemuan tingkat tinggi negara-negara yang memiliki wilayah laut ataupun pantai. WOC sendiri mempunyai kewenangan terhadap negara-negara anggotanya baik itu tentang perlindungan maupun sanksi².

Tulisan yang mengangkat judul **“Upaya Pemerintah Indonesia Terhadap PT Freeport Indonesia Terkait Masalah Limbah Buang (Tailing) Melalui Konferensi Kelautan Dunia (WOC)”** ini merupakan sumbangan penulis untuk menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga ekosistem akibat hasil limbah maupun peningkatan karbon akibat lalu lintas perairan yang membawa hasil tambang, dalam hal ini adalah PT Freeport Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan karena sepanjang penulis bahwa belum adanya penulis lain yang mengangkat tema lingkungan yang

² WOC, *Official site WOC*, diakses dari <http://www.sulut.go.id/wos/apawoc.html> , pada tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.06

dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dan kepentingan dibalik adanya Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dilaksanakan di Indonesia sebagai tugas akhir dalam menempuh Sarjana Ilmu Politik

B. Latar Belakang Masalah

Dalam perairan dunia terdapat juga wilayah yang disebut Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) yang mencakup Indonesia, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, Malaysia, Solomon, dan Australia memiliki peran yang sangat penting karena kawasan ini diperkirakan mampu mengatasi masalah perubahan iklim global dan menyerap karbon dalam jumlah yang sangat besar.

Indonesia dihadapkan dengan keunggulan bila dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan diatas, Indonesia mempunyai peranan penting dalam menghadapi perubahan iklim dunia. Kawasan Indonesia baik di lepas pantai maupun daratan kepulauannya memiliki sumber daya minyak dan gas yang melimpah. Dan banyak sejumlah perusahaan asing multinasional, seperti perusahaan dari Amerika Serikat yang beroperasi dikawasan Coral Triangle Initiative (CTI). Juga terdapat indikasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut membuang limbahnya ke laut.

Berdasarkan catatan Jatam (2009), Buangan limbah (tailing) tambang emas PT Newmont dan PT Freeport Indonesia mencapai 340 ribu ton perhari. Bisa dibayangkan betapa tingginya tingkat pencemaran terhadap ekosistem kelautan di perairan Indonesia. Buangan limbah dapat mematikan

ekosistem terumbu karang, populasi ikan, biota laut serta dapat merusak pantai³.

Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan AMDAL sebagai pagar untuk perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dengan alam, pasca kekalahan WALHI oleh PT Freeport pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penekanan terhadap perusahaan-perusahaan-perusahaan seperti PT Freeport dengan meningkatkan kualitas AMDAL dengan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi untuk meminimalisir hasil limbah sehingga dapat didaur ulang.

Menurut website www.tempointeraktif.com 2007, Kementerian lingkungan hidup masih memantau perkembangan PT Freeport terkait hasil audit lingkungannya yang dipermasalahkan oleh WALHI. PT Freeport harus memenuhi beberapa persyaratan lingkungan yang dilaksanakan oleh tim Proper KLH pada tahun 2006, dan bila tidak melaksanakan persyaratan lingkungan tersebut PT Freeport akan mendapatkan sanksi.

Banyaknya wacana-wacana terdapatnya manipulasi AMDAL baru-baru ini membuat Pemerintah Indonesia untuk lebih memperketat aturan mengenai kualitas air dan ekosistem kehidupan biota laut, dengan memanfaatkan momentum konferensi kelautan dunia (WOC) untuk membuat aturan-aturan baku tentang pengendalian kualitas mutu air.

Lepas dari semua yang dipaparkan diatas World Ocean Conference atau Konferensi Kelautan Dunia lebih kepada ketindaklanjutan dari pertemuan

³ Rusman, *Mencermati Politik Kepentingan Konferensi Kelautan Dunia (WOC)*, diakses dari http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=206&type=10, pada tanggal 12 Agustus 2010 pukul 20.09

di Kopenhagen maupun di Rio De Janeiro, Brazil. Semuanya terkait dengan perubahan iklim yang terjadi pada keseluruhan belahan bumi, baik badai maupun kemarau berkepanjangan yang tiada henti melanda permukaan bumi.

Coral Triangle Initiative (CTI) itu sendiri adalah sebuah lokasi atau lebih tepatnya kumpulan habitat terumbu karang yang tidak dimiliki dan ditemui dibelahan bumi yang lain, sehingga bila terumbu karang yang berada pada wilayah tersebut rusak maka akan berimbas pada habitat yang lainnya. Keseimbangan tidak terjadi antara ketersediaan sumber daya alam, sistem sumber daya manusia, cara memanfaatkan, mengolah dan mendaur-ulang sebuah produk yang ramah akan lingkungan.

Perusahaan-perusahaan asing pun tidak sehebat yang dibayangkan dalam mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa artikel yang membahas masalah lingkungan hidup, tentang bagaimana PT Freeport Indonesia membuang limbah ke sungai dan bermuara ke laut, yang merusak ekologi sekitarnya, dimana ekologi tersebut merupakan kawasan konservatif yang masuk dalam program Coral Triangle Initiative (CTI).

Rakyat serta Pemerintah Indonesia harus berusaha berfikir kritis dalam konferensi kelautan dunia (WOC). Indonesia harus mampu menunjukkan kualitas politik luar negerinya terlebih pada area lingkungan kedaulatannya sendiri, karena ini adalah tugas bersama seluruh komponen negara Republik Indonesia untuk menjaga masa depan sumber daya alamnya.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan menjadi; *“Mengapa Pemerintah Indonesia memperjuangkan kepentingannya terhadap PT Freeport Indonesia terkait masalah limbah buang (tailing) melalui Konferensi Kelautan Dunia (WOC)?”*.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Indonesia menjadi tempat bertemunya 70 Negara dunia dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC) bukan tanpa alasan tersendiri. Jadi disini penulis menggunakan Teori Kepentingan Nasional, Konsep Organisasi Internasional dan Konsep Lingkungan yakni Konsep Ekosentris yang digunakan sebagai pendekatan terhadap apa yang akan dan telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC).

Ketiga konsep yang dipakai penulis merupakan landasan dasar untuk mengambil dan menyimpulkan dari permasalahan yang akan diangkat tersebut, yang akan dijabarkan sebagai berikut;

a. **Konsep Kepentingan Nasional,**

Dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi,

sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasionalnya terpenuhi maka negara akan tetap bertahan.

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan bangsa dan negara, kemerdekaan, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada kepentingan secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan pemerintah, maka konsep ini lebih menjadi akurat jika dianggap sebagai *national interest*⁴.

Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak menghiraukan prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang menjalankan kebijakan realistik, berlawanan dengan kebijakan idealis yang memperlihatkan prinsip moral internasional, dengan tidak meninggalkan prinsip moral internasional itulah yang dicoba

⁴ Plano Jack C. and Roy Olton. *The International Relation Dictionary*, Sanata Barbara, California Press, 1992, hal.7

untuk digunakan penulis dalam menjelaskan bagaimana cara pemerintah Indonesia dalam menindak PT Freeport Indonesia dalam kancah internasional melalui forum internasional.

Konferensi Kelautan Dunia (WOC) menjadi mediator untuk pemerintah Indonesia untuk lebih menegaskan bahwa “mengambil tidak serta merta meninggalkan begitu saja tetapi bagaimana cara membuat berkesinambungan”.

b. Konsep Organisasi Internasional

Definisi Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya: “Administrasi dan Organisasi Internasional” menegaskan bahwa:

“ Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas–batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan–tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda”⁵.

⁵ Rudy T. May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 3.

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : “Administrasi dan Organisasi Internasional” menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut⁶:

- a) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
- b) Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri, untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation dll).

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah⁷;

- a) Tempat berhimpun bagi Negara–Negara anggota bila Organisasi Internasional tersebut IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila

⁶ *Ibid*, hal 27

⁷ *Ibid*, hal 27-28

Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah).

- b) Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian – perjanjian Internasional.
- c) Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim–rejim Internasional.
- d) Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan Negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya.
- e) Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Relevansi dari teori ini nantinya akan digunakan Pemerintah Indonesia sebagai jalan tengah, bagaimana kelangsungan PT Freeport Indonesia jika tetap menginginkan ada di wilayah NKRI, dengan mencari kesepakatan yang lebih baik,. Meskipun kesepakatan (penekanan) tersebut dicapai harus melalui tingkatan yang lebih tinggi.

c. **Prinsip Ekosentrisme.**

Prinsip Ekosentrisme pada Etika Lingkungan. Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup dan benda lainnya saling terkait satu sama lain, oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi oleh makhluk hidup saja⁸.

Teori ekosentrisme ini juga lebih populer dikenal sebagai Deep Ecology (DE). Dalam hal hubungan manusia dan lingkungan, terdapat beberapa paham, konsepsi dan pelaksanaan yang menjelaskan hakekat dari hubungan tersebut, bahwa paham, konsepsi, cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan itu berkembang atas dasar pengembangan etika, yakni etika lingkungan. Etika lingkungan berkembang sejalan dengan adanya pergeseran tujuan pengelolaan lingkungan yang mengarah pada konsep Sustainable (lestari, berkelanjutan). Pergeseran etika semacam itu muncul karena adanya kesadaran manusia bahwa sumberdaya alam perlu diwariskan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia di masa depan secara lestari

Deep Ecology (DE) adalah suatu bentuk peraturan baru yang harus menjadi tuntunan wajib setiap negara, karena merupakan salah satu bagian dari isu pemanasan global (*global warming*) yang menjadi fokus utama negara-negara didunia saat ini. Suatu tindakan keharusan bagi Pemerintah Indonesia untuk

⁸ Keraf, A, Sony, *Etika Lingkungan*, Kompas, 2006, hal 75

menerapkan prinsip tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dengan pengolahan sumber daya alam seperti halnya PT Freeport Indonesia.

Deep Ecology (DE) menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, yang mana kaitannya adalah teori inilah yang akan membawa penulis untuk menentukan bagaimana upaya peran indonesia dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dalam mengatasi persoalan baik limbah maupun peningkatan karbon yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

Penulis mengutamakan bahwa dari Prinsip Ekosentrisme lebih menekankan kepada bagaimana PT Freeport Indonesia peduli terhadap ekosistem baik kaitannya dengan limbah buang, daur ulang dan akibat-akibat lain yang mempengaruhi perubahan iklim dunia. Keseimbangan SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) mungkin akan terjadi bilamana prinsip ekosentrisme itu di terapkan.

E. Hipotesa

Dengan menggunakan ketiga Teori Kepentingan Nasional, Konsep Organisasi Internasional dan Prinsip Ekosentrisme tersebut, maka terdapat

beberapa jawaban sementara untuk menjawab rumusan masalah di atas, diantaranya;

- 1) Ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk menekan langsung PT Freeport Indonesia.
- 2) Pemerintah Indonesia mempunyai peranan penting dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC).

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perjuangan Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC) terhadap PT Freeport Indonesia yang mana kemampuan tersebut menjadi tolak ukur dari pengaruh politik Indonesia terhadap globalisasi.
2. Untuk mengetahui fakta-fakta yang telah dilakukan PT Freeport Indonesia, bagaimana dampak, dan perkembangan perusahaan multinasional tersebut.
3. Untuk menambah wawasan mengenai fakta tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup yang harus diperjuangkan bersama baik di dalam forum dunia maupun di luar forum, terlebih pada program yang ada pada Konferensi Kelautan Dunia (WOC)
4. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

G. Metodologi Penulisan dan Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berifat deskriptif argumentatif, gambaran atau lisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki, dalam hal ini adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk mulai menekan PT Freeport Indonesia melalui Konferensi Kelautan Dunia (WOC) terkait limbah buang (tailing) yang berada pada kawasan konservasi terumbu karang.

Data-data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan.

Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel di internet dan video, serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang akan dijadikan bahan acuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

H. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan penelitian tidak meluas dan analisis lebih mendetail, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini.

Batasan waktu yang digunakan adalah sejak terjadinya perusakan lingkungan oleh PT Freeport Indonesia sampai saat Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Coral Triangle Initiative Summit diadakan pada bulan Mei 2009. Sehingga lebih terarah untuk mengetahui sejauh mana perjuangan pemerintah Indonesia dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC).

Jangkauan penelitian dibuat lebih sederhana, lebih terarah pada pokok permasalahan sehingga jawaban dari rumusan dapat sesuai dengan hipotesa penulis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka secara keseluruhan penulis membagi karya tulis ini ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi dan pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. PT Freeport Indonesia

Bab ini akan menguraikan segala permasalahan PT Freeport Indonesia, mulai dari sejarah PT Freeport berada di Indonesia sampai pada masalah limbah buang, terdapatnya

perbandingan kontrak kerja sampai pada dinamika PT Freeport hingga perlunya dibawa kepada jenjang yang lebih tinggi lagi.

BAB III. Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Coral Triangle Initiative Summit (CIT)

Bab ini akan menjabarkan tentang Konferensi Kelautan Dunia (WOC) sebagai profil dasar yang nantinya akan digunakan sebagai media untuk membahas masalah yang ditimbulkan oleh PT Freeport. Dasar-dasar Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Coral Triangle Initiative Summit diuraikan pada bab ini.

BAB IV. Perjuangan Pemerintah Indonesia

Pada bab empat ini, penulis mencoba memaparkan bagaimana dan sejauh mana peran pemerintah dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC), apakah menyinggung tentang penanaman modal asing ataukah hanya kepentingan ekonomi semata, dan bagaimanakah komitmen PT Freeport menyikapi masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh sistem operasional perusahaannya.

BAB V. Penutup

Bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, berisikan kesimpulan yang lebih ringkas dan tegas daripada bab sebelumnya, dan juga saran untuk penulis secara pribadi bagaimana menyikapi tindakan PT Freeport untuk Indonesia.